

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan sebuah dinamika positif yang cukup signifikan, namun sebagai salah satu negara berkembang tantangan utama yang dihadapi adalah pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar berkat sumber daya alam dan pasar domestik, ketimpangan sosial ekonomi dan ketergantungan pada ekspor sumber daya alam menjadi hambatan bagi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial di setiap wilayah agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata. Dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan per kapita Indonesia dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah bentuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan kontribusi signifikan pada pendapatan perkapita secara nasional dikarenakan adanya hubungan input dan output yang dihasilkan akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan perkapita daerah pada pusat kegiatan ekonomi tersebut (Wicaksono, 2019).

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi salah satu komponen vital dari standar ekonomi di sebuah wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang dinilai dari eskalasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai acuan merupakan ukuran kesuksesan suatu daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi. Suatu daerah diharuskan memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan daerah tersebut. Keberhasilan pembangunan daerah sangat menentukan kesuksesan pembangunan

nasional. Oleh sebab itu, daerah dituntut untuk melakukan peningkatan kapasitas dalam mengelola potensi daerahnya (Sendi & Syahbudi, 2022).

Setiap daerah atau wilayah selalu memiliki karakteristik yang berbeda, perbedaan tersebut yaitu sumber daya dan potensi masing-masing sektor di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan serta menjalankan program pembangunan daerah tidak dapat disama ratakan dengan daerah lainnya. Selain itu, suatu daerah juga mempunyai ciri khas atau keunikan yang beragam dan menyesuaikan dengan keperluan daerah seperti letak geografis, budaya, serta keadaan sosial penduduknya. Oleh sebab itu, maka diperlukan kebijakan berupa rencana pembangunan daerah yang tepat dan sesuai untuk menguatkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi memiliki peluang tinggi melalui proses pengembangan, peningkatan, serta optimalisasi sumber daya yang ada secara optimal, karena kebijakan rencana pembangunan daerah yang tepat akan membuat pertumbuhan ekonomi mengalami eskalasi yang signifikan serta akan membuka lapangan kerja baru dan menambah proses penghasilan barang dan jasa yang akan membuat pendapatan perkapita masyarakat naik (Destiningsih et al., 2019).

Menurut teori basis ekonomi, determinan atau elemen utama dalam pertumbuhan ekonomi memiliki sebuah hubungan atau korelasi dengan besar kecilnya jumlah permintaan barang serta jasa dari luar daerah. Di dalam teori basis ekonomi, setiap cakupan wilayah merupakan suatu sistem atau mekanisme dalam sosial ekonomi dengan struktur yang jelas. Yang menjadi dasar dari teori ini adalah pemikiran tentang metode *Location Quotient (LQ)*, dimana metode tersebut merupakan suatu metode yang menunjang ditetapkannya kinerja ekspor

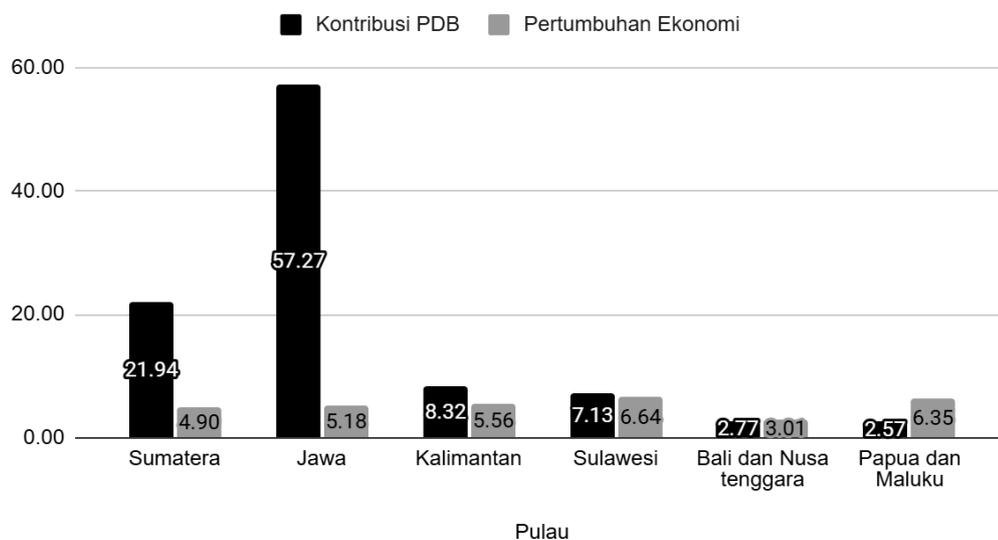
perekonomian dari suatu wilayah serta merupakan tingkat swasembada sektor (Putri & Huda, 2023).

Kemampuan setiap daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya melalui pembangunan ekonomi tercermin dan dapat dinilai dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai di wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi. Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di setiap daerah juga merupakan salah satu ukuran umum untuk mengukur tingkat kesejahteraan di tingkat nasional, dimana hal tersebut merupakan puncak atau tujuan akhir dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, sangat bisa dimengerti jika setiap pemerintah daerah selalu berusaha untuk meningkatkan PDRB daerahnya (Aditama, 2019).

Peningkatan PDRB secara periodek atau berkala dapat menunjukkan seberapa besar peningkatan kesejahteraan penduduknya. Pemerintah daerah dituntut untuk wajib bisa menggali potensi ekonomi lokal melalui sektor basis dan non basis, khususnya pada sektor basis daerah tersebut guna meningkatkan PDRB. Penciptaan barang dan jasa dari sumber luar daerah dimungkinkan untuk kegiatan ekonomi pada sektor basis dan non basis, khususnya kegiatan pada sektor basis. Sedangkan untuk kegiatan non basis sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah serta inisiatif untuk memenuhi kebutuhan daerah. Oleh karena itu daerah merupakan satu-satunya tempat untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut. Kegiatan dasar sangat penting untuk melakukan analisis dan memperkirakan masa depan ekonomi lokal (Aditama, 2019).

Aktivitas ekonomi di Indonesia untuk saat ini masih berpusat di salah satu pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia yaitu pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan tingkat kemajuan pembangunan di Pulau Jawa paling signifikan dalam memberikan sumbangan PDB terbesar di Indonesia. Besarnya sumbangan PDB dipengaruhi kondisi wilayah di Pulau Jawa yang memiliki sumber daya alam melimpah, pasar domestik yang luas, dan angkatan kerja usia produktif yang berpendidikan serta ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia (Maodi & Desmintari, 2022).

Gambar 1. 1 Kontribusi PDB dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Pulau di Indonesia Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023 data diolah

Berdasarkan data pada grafik di atas dapat dilihat bahwasannya Provinsi di Pulau Jawa memiliki dominasi terhadap nilai perekonomian Indonesia pada

kuartal atau triwulan III-2023 dengan nilai kontribusi terhadap PDB sebesar 57,27% serta nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18% (*year on year*).

Tabel 1. 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi di Pulau Jawa ( Milyar Rupiah)

Provinsi	Tahun		
	2021	2022	2023
Banten	460.952,79	484.131,22	507.427,24
DKI Jakarta	1.856.000,70	1.953.488,99	2.050.465,97
Jawa Barat	1.507.746,39	1.589.984,93	1.669.416,86
Jawa Tengah	997.321,13	1.050.278,09	1.102.563,18
DIY Yogyakarta	107.372,56	112.901,32	118.626,84
Jawa Timur	1.668.754,36	1.757.874,93	1.844.808,67

Sumber : BPS Indonesia Data Diolah

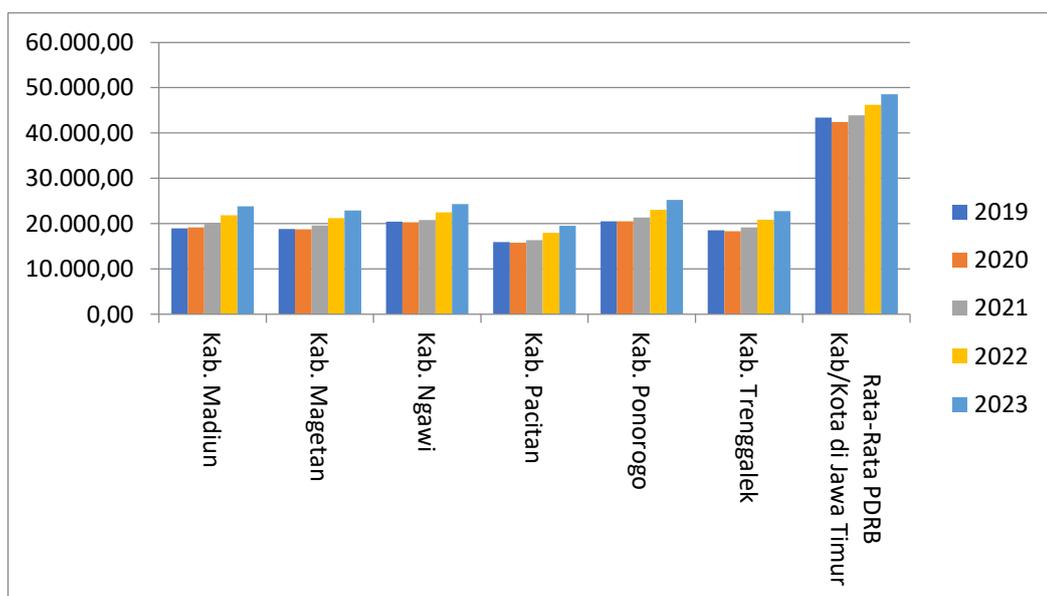
Terlihat dari data kontribusi PDRB menunjukkan bahwa kecepatan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur selalu berada diatas rata-rata Provinsi yang ada di Pulau Jawa. Namun masalah ketimpangan pemerataan pembangunan di antara daerah yang ada di Jawa Timur termasuk pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur bagian barat daya masih menjadi masalah yang harus diperbaiki.

Dalam usaha untuk mengembangkan perekonomian daerah dengan tujuan mengurangi ketertinggalan dengan daerah lainnya, strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan analisis sektor unggulan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Hidayah & Sumanto, 2022) di Kabupaten Kediri, menunjukkan potensi daerah kediri adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan hasil dari anlaisis di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan sektor industri pengolahan merupakan

sektor unggulan yang menjadi potensi utama untuk memberikan kontribusi signifikan pada daerah tersebut. Untuk provinsi Jawa Timur sendiri rata-rata sektor ekonomi menunjukkan bahwa sektor potensialnya merupakan sektor informasi dan sektor industri Pengolahan (Mulyanto & Rachmawati, 2021).

Ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur bagian barat daya meliputi enam kabupaten yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek dikarenakan nilai PDRB dari keenam kabupaten tersebut semuanya berada di bawah rata-rata nilai PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Jika melihat kondisi geografis dan ekonomi di keenam kabupaten tersebut yang hampir sama maka dapat diasumsikan jika saat ini masih belum terjadi pengoptimalan potensi ekonomi di daerah tersebut (Mevia, 2023). Berikut merupakan grafik dari data hasil kontribusi PDRB daerah di Provinsi Jawa Timur bagian barat daya.

Gambar 1. 2 PDRB Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Bagian Barat Daya Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)



Sumber : Data BPS yang telah diolah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di atas, Nilai PDRB di keenam kabupaten mengalami fluktuasi dalam periode tahun 2019-2023. Namun, nilai PDRB tersebut masih selalu jauh tertinggal dibandingkan rata – rata nilai PDRB pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Dampak nilai PDRB yang berada di bawah rata-rata dapat mencerminkan adanya ketimpangan ekonomi yang signifikan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Hal ini sering kali mengindikasikan rendahnya daya saing suatu wilayah, keterbatasan dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial, dan kurangnya akses terhadap infrastruktur yang memadai. Akibatnya, wilayah tersebut mungkin mengalami kesulitan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan per kapita, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Ketimpangan PDRB juga dapat menghambat pencapaian pembangunan yang inklusif, dimana manfaat pertumbuhan ekonomi tidak merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu fokus pada kebijakan yang dapat meningkatkan PDRB daerah-daerah tertinggal guna menciptakan keseimbangan pembangunan ekonomi (Firmansyah, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk memilih Provinsi Jawa Timur Bagian Barat Daya dikarenakan keenam kabupaten yang berada pada wilayah tersebut memiliki letak geografis dan karakteristik daerah yang hampir sama namun memiliki pendapatan daerah yang berupa nilai PDRB yang selalu di bawah rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur.

Peneliti tertarik untuk menentukan dan membandingkan sektor basis dan non basis karena pada dasarnya kedua hal tersebut merupakan komponen yang mendorong pembangunan ekonomi di sebuah wilayah atau daerah. Berdasarkan

latar belakang tersebut peneliti memilih sampel dari enam daerah yang berada pada bagian barat daya Provinsi Jawa Timur untuk dibandingkan sektor basis dan non basisnya serta melihat potensi ekonomi yang ada pada daerah tersebut. Maka peneliti pada akhirnya menentukan judul penelitian mengenai “**Analisis Potensi Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Bagian Barat Daya Menggunakan Metode Analisis LQ, Shiftshare, dan Tipologi Klassen**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja sektor basis dan non basis yang terdapat pada Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek?
2. Apakah terdapat pergeseran sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek?
3. Manakah yang potensi pertumbuhan ekonominya paling besar diantara Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek?
4. Bagaimana Tipologi Klassen di Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja sektor basis dan non basis yang terdapat pada Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui pergeseran kondisi sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mengetahui manakah yang potensi pertumbuhannya paling besar diantara Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek.
4. Untuk mengetahui bagaimana Tipologi Klassen di Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam riset ini diharapkan bisa menghasilkan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca mengenai sektor basis dan sektor non basis, serta pengaruh dan perbandingan kemajuan tiap sektor terhadap laju pertumbuhan ekonomi.
2. Sebagai acuan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam merencanakan kebijakan yang tepat dan optimal untuk mengembangkan sektor-sektor dengan sumber daya yang ada berdasarkan potensin masing-masing wilayah.

3. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini.